

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Akuntansi

Menurut Warren dalam Atika, et al (2022: 4) akuntansi merupakan sistem informasi yang menyediakan laporan kepada para pengguna mengenai aktivitas ekonomi ekonomi dan kondisi bisnis perusahaan. Selanjutnya Indra dalam Asiah et al (2023: 11) akuntansi adalah suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi, digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan alternatif arah tindakan.

2.1.1.1 Tujuan dan Fungsi Akuntansi

Menurut Nugraha (2023: 3) dalam perkembangan terakhir, akuntansi telah dibagi menjadi beberapa bidang khusus sesuai dengan tujuan penyelenggara akuntansi namun akuntansi memiliki tujuan dasar yaitu pencatatan, pengumpulan serta pelaporan informasi keuangan dalam bisnis entitas.

Fungsi dari akuntansi yaitu sebagai alat perencanaan pertumbuhan entitas, sebagai alat untuk mendapatkan investor atau menjual bisnis entitas, sebagai alat untuk merekam catatan transaksi, sebagai pelindung asset atau properties serta sebagai instrument dalam menganalisis dan menafsirkan (Nugraha, 2023: 4)

2.1.1.2 Manfaat Akuntansi Keuangan

Menurut Radiansyah (2023: 18) akuntansi mempunyai berbagai manfaat sebagai berikut.

1. Mengontrol dan membantu keuangan
2. Memfasilitasi Pengambilan keputusan
3. Memenuhi kewajiban hukum
4. Meningkatkan kredibilitas bisnis
5. Memperlihatkan kinerja keuangan
6. Membantu efisiensi biaya

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Meliana dalam Hartoto, et al (2023 : 2) akuntansi sector public merupakan gabungan kata akuntansi dengan sektor publik. Akuntansi merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, penganalisisaan, dan pelaporan transaksi keuangan dari suatu entitas untuk menyediakan informasi keuangan bagi entitas untuk pengambilan keputusan sedangkan sector public merupakan entitas yang dikelola dan dibiayai sebagian atau seluruhnya dari pembiayaan public. Selanjutnya menurut Handayani (2019:1) akuntansi sektor publik adalah sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga public sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

2.1.2.1 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hartoto (2023: 32) tujuan akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut.

1. Manajemen kontrol yaitu sebagai pengendali manajemen dan akuntansi sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien serta memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik.
2. Akuntabilitas yaitu memiliki tujuan untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi manajer sektor publik, *accountability* digunakan dalam pelaporan pelaksanaan tanggung jawab atau sumber daya atau bidang atau divisi yang berada dalam wewenang manajer tersebut.

2.1.2.2 Jenis Akuntansi Sektor Publik

Menurut Hartoto (2023: 34) akuntansi pemerintah menggunakan data akuntansi sebagai informasi dalam penerapannya dan akuntansi ini berkaitan dengan berbagai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah yang akan diberikan kepada pihak eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat. Pada jenis ini dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu akuntansi pemerintah pusat dan akuntansi pemerintah daerah; akuntansi provinsi dan akuntansi pemerintah kabupaten atau kota.

2.1.2.3 Peran Akuntansi Sektor Publik

Menurut *american accounting association* (1990) dalam Glynn (1993) menyatakan peran akuntansi sektor publik adalah untuk

- a. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atau suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi.
- b. Memberikan informasi yang memungkinkan manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya serta memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah atas penggunaan dana publik.

2.1.3 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 2005, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah suatu penyajian data keuangan termasuk catatan yang menyertainya, bila ada yang dimaksudkan untuk mengkomunikasikan sumber daya ekonomi (aset) dan kewajiban suatu entitas pemerintah pada saat tertentu atau perubahan atas aset dan kewajiban selama suatu periode tertentu atau perubahan atas aset dan kewajiban selama suatu periode tertentu sesuai dengan SAP. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode laporan. Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah mempunyai tujuan secara umum, Bastian (2009) menyebutkan bahwa tujuan umum dari pelaporan keuangan dalam pemerintah daerah yaitu menyediakan informasi yang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan dan untuk mendemonstrasikan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercaya dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- b. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mendanai aktivitasnya dan memenuhi persyaratannya;
- c. Menyediakan informasi yang berguna dalam mengevaluasi kemampuan entitas untuk mendanai aktivitasnya dan untuk memenuhi kewajiban serta komitmennya;
- d. Menyediakan informasi mengenai kondisi keuangan suatu entitas dan perubahan didalamnya;
- e. Menyediakan informasi menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja entitas atas hal biaya jasa, efisiensi dan pencapaian tujuan.

Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang komprehensif. Bagi pihak eksternal, LKPD yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja (Surepno,2013). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005, SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang setidaknya meliputi Laporan Realisasi

Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan dengan diberlakukan SAP dalam pertanggungjawaban keuangan pemerintah, diharapkan akan menghasilkan sebuah laporan pertanggungjawaban yang bermutu, memberikan informasi yang lengkap, akurat dan mudah dipahami berbagai pihak terutama BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dalam menjalankan tugasnya.

2.1.4 Belanja Daerah

Pengertian belanja daerah menurut Halim (2002) adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan belanja daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintah wajib terkait dengan pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (Sari & Wati, 2021).

Belanja daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Lubis (2014) menyatakan bahwa belanja di sektor publik diartikan sebagai jumlah uang yang telah dikeluarkan selama satu tahun anggaran. Halim (dalam DJPK, 2014) menjelaskan belanja daerah sebagai pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab kepada masyarakat

dan pemerintah di atasnya. Oleh karena itu, belanja daerah dapat di definisikan jumlah dana yang tersedia dalam satu tahun anggaran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat (Amrie Firmansyah, 2020).

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum (Windhu Putra, 2018).

Belanja daerah menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan pegawai ASN serta dianggarkan pada SKPD yang bersangkutan. Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Tambahan penghasilan tersebut diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk

barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi diberikan kepada BUMN, BUMD atau badan usaha milik swasta yang bertujuan untuk meningkatkan harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN atau badan dan lembaga serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Belanja hibah bersifat spesifik yang telah ditetapkan peruntukannya, tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakata. Penganggaran belanja hibah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang an/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif. Tujuan diberikannya bantuan sosial yaitu untuk melindungi penerima bantuan sosial dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Penganggaran belanja bantuan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

7. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria antara lain: (a) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; (b). digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan (c) memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan. Aset yang dianggarkan dalam belanja modal meliputi:

- a. Belanja tanah
- b. Belanja peralatan dan mesin
- c. Belanja bangunan dan gedung
- d. Belanja jalan, irigasi dan jaringan
- e. Belanja aset tetap lainnya

f. Belanja aset lainnya.

8. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pemerintah daerah lainnya.

9. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan tujuan tertentu lainnya. Belanja bantuan keuangan terdiri dari:

- a. Bantuan keuangan antar daerah provinsi
- b. Bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota
- c. Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya atau di luar wilayahnya
- d. Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya atau daerah provinsi lainnya
- e. Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

10. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembangan atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah pada tahun-tahun sebelumnya.

Keadaan darurat dimaksud meliputi :

- a. Bencana alam. Bencana non-alam, bencana sosial dan kejadian luar biasa
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Sedangkan keperluan mendesak meliputi:

a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib

c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan

d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

2.1.4 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan daerah merupakan suatu gambaran tentang tingkat pencapaian pelaksanaan pemerintah daerah dalam suatu program atau kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, sekaligus visi yang telah ditetapkan dalam suatu program dalam periode tertentu (Bastian, 2010).

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) peraturan pemerintah No.11 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keseluruhan proses pengelolaan tersebut harus saling terintegrasi, berkaitan dan dijalankan dengan sebaik mungkin untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Menurut Armaja et al (2017) menjelaskan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa kinerja adalah suatu keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisien atas realisasi dari alokasi yang dilakukan pemerintah terhadap suatu anggaran.

Menurut Ika et al (2022) menjelaskan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 bahwa diperlukan pengelolaan finansial daerah yang bagus memerlukan proses pengelolaan yang berkesinambungan dan dijalankan dengan baik. Hal ini karena proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian keuangan daerah dianggap satu kesatuan.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Mahmudi (2010) Rasio Efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 167 ayat 1 menyatakan bahwa belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan urusan wajib dan pelayanan lain dibidang pendidikan, kesehatan, penyediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan pengembangan sistem jaminan sosial. Oleh karena itu, semakin tinggi belanja pemerintah daerah seharusnya mencerminkan semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pelayanan yang diberikan, maka semakin tinggi skor kinerja keuangan pemerintah tersebut (Nugroho, 2018).

Pelaksanaan otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber yang ada sehingga mampu membiayai sendiri belanja daerahnya. Melalui pengalokasian belanja daerah yang memadai, kualitas kinerja keuangan daerah dapat ditingkatkan (Janah, 2019).

2.3 Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Asmaul Aziz	<p>Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Peemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur)</p> <p>Jurnal EKSIS</p> <p>Volume XI No. 1, 2016</p> <p>ISSN : 1907-7513</p>	<p>Variabel :</p> <p>Ukuran Daerah, <i>Intergovernmental Revenue</i>, Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p> <p>Alat Analisis :</p> <p>Analisis Regresi linier berganda.</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Variabel ukuran (<i>size</i>) adalah</p>	<p>Variabel:</p> <p>Belanja Daerah sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen.</p>	<p>Objek dan lokasi penelitian.</p> <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis Regresi linier berganda</p> <p>Variabel : Ukuran Pemerintah Daerah dan <i>Intergovernmental Revenue</i>.</p>

			<p>positif yang mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran suatu pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Variabel <i>intergovernmental revenue</i> adalah positif mengindikasikan bahwa semakin tinggi <i>intergovernmental revenue</i> semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah yang merupakan transfer dana pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.</p> <p>Variabel belanja daerah, sesuai dengan hipotesis yaitu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>		
2.	Nur Shafira Anynda	Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah	Variabel : Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas	Variabel: Variabel pada penelitian ini sama-	Objek dan lokasi penelitian.

		<p>Terhadap Kinerja Keuangan Daerah</p> <p>Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi</p> <p>ISSN : 2460-0585</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah, Dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah</p> <p>Alat Analisis :</p> <p>Analisis Regresi linier berganda.</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Variabel Rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah .dengan demikian uji t ini mendukung hipotesis yang pertama bahwa rasio kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Belanja</p>	<p>sama menggunakan Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan</p>	<p>Variabel :</p> <p>Rasio Kemandirian Daerah dan Efektifitas Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis Regresi linier berganda</p>
--	--	--	--	---	--

			daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah.		
3.	Berti Indah Sari dan Halmawati	<p>Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat</p> <p>Jurnal Eksplorasi Akuntansi</p> <p>Volume 3 No. 1 Tahun 2021</p> <p>ISSN : 2656-3649</p>	<p>Variabel :</p> <p>Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Alat Analisis :</p> <p>Analisis Regresi linier berganda.</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana</p>	<p>Variabel:</p> <p>Variabel pada penelitian ini sama-sama menggunakan Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan</p>	<p>Objek dan lokasi penelitian.</p> <p>Variabel :</p> <p>Variabel penelitian ini menggunakan Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah</p> <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis Regresi linier berganda</p>

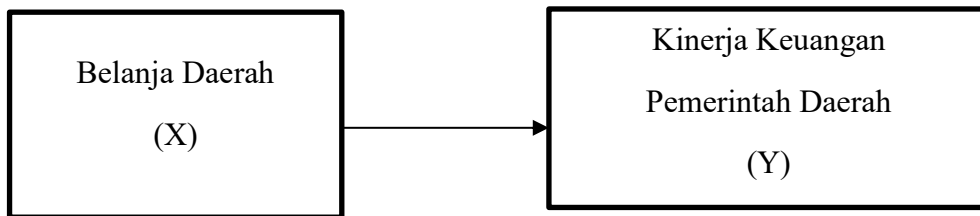
			alokasi umum (DAU) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitian ini adalah belanja daerah berpengaruh positif kinerja keuangan pemerintah daerah.		
4.	Doni Hakiki, Tumija, dan Ika Agustina	<p>Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau</p> <p>Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik</p> <p>Volume. 10 No. 1, Juni 2023</p> <p>E-ISSN: 2685-6069</p>	<p>Variabel :</p> <p>Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah</p> <p>Alat Analisis :</p> <p>Analisis Regresi linier berganda.</p> <p>Hasil Penelitian:</p> <p>Temuan pertama menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas variabel X1 (rasio</p>	<p>Variabel:</p> <p>Variabel pada penelitian ini sama-sama menggunakan Belanja Daerah dan Kinerja Keuangan</p>	<p>Objek dan lokasi penelitian.</p> <p>Variabel :</p> <p>Variabel penelitian ini menggunakan Kemakmuran Pemerintah Daerah, Tingkat Ketergantungan Pemerintah Daerah</p> <p>Alat Analisis:</p> <p>Analisis Regresi</p>

			kemandirian daerah) terhadap variabel Y (kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sekadau) gtemuan berikutnya bahwa variabel X2 (belanja daerah) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y (kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten sekadau)		linier berganda
5.	Tatas Ridho Nugroho	<p>Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Jawa Timur</p> <p>Jurnal Akuntansi dan Pendidikan</p> <p>Volume 7 No.1 2018</p>	<p>Variabel : Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Alat Analisis : Analisis Regresi linier berganda.</p> <p>Hasil Penelitian:</p>	<p>Variabel: ,Belanja Daerah sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah sebagai variabel dependen.</p>	<p>Objek dan lokasi penelitian.</p> <p>Alat Analisis: Analisis Regresi linier berganda</p> <p>Variabel: VariabelUkuran Daerah, <i>Intergovermental</i></p>

		E-ISSN : 2477-4995	<p>Ukuran (<i>size</i>) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p><i>Intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p> <p>Belanja daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah</p>		<i>Revenue</i>
--	--	--------------------	---	--	----------------

1.4 Kerangka Pemikiran

Menurut Sujarweni (2015:66) kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti. Maka variabel independen adalah Belanja Daerah (X) dan variabel dependen adalah Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah kerangka berpikir dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 2.1

2.5 Hipotesis

Menurut suwarjeni (2015:68) merupakan jawaban sementara terhadap tujuan penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran yang telah dibuat. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang hubungan antara beberapa dua variabel atau lebih. Diduga ada Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten OKU Timur Tahun 2018-2022.